

PENYEDIAAN SARANA PRASARANA AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Andi H. Rizal¹ (dayat_rizal@yahoo.co.id)

Andi Kumalawati² (kumalawatirizal@gmail.com)

ABSTRAK

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan program pembangunan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, yang dilakukan melalui : (i) pembangunan yang berkualitas, (ii) keberpihakan kepada yang miskin, (iii) otonomi dan desentralisasi, (iv) partisipatif, (v) keswadayaan, dan (vi) keterpaduan pembangunan. Studi ini mengkaji pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. Tujuan dari pengkajian ini adalah memberikan gambaran umum model pemberdayaan masyarakat pada pekerjaan penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi. Simpulan yang diperoleh, bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat pada pekerjaan pembangunan penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi dilakukan dengan metode pendekatan partisipatif (*participatory approach*), pendekatan kemanusiaan (*humanity approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Air Minum; Sanitasi

ABSTRACT

Community based potable water supply system and sanitation is a program which engages spesific approach of empowering the target community and increasing their partisipation in the implementation of the program. This approach is put into effect through the followings : (i) quality development; (ii) in favour with the poor; (iii) autonomous and decentralized; (iv) participative; (v) autoactivit, and (vi) compositeness. This study aimed at showing general mode of community empowering, in the program of potable water supply system and sanitation. It was concluded that methods for the approach of community empowering in the construction of potable water supply and sanitation system are : participatory approach, humanity approach and conceptual approach.

Key Words : Empowering; Community; Potable Water; Sanitation

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia. Ada tiga faktor penyebab kemiskinan : (i) kebijakan dan aturan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin; (ii) rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber-sumber daya pembangunan; (iii) kondisi geografis (keterisolasian dan keterpencilan) yang menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat tersebut dengan masyarakat lainnya.

Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah (Inpres Nomor 5 Tahun 1993) yang dikenal dengan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), banyak program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat telah diluncurkan, diantaranya: Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pemberdayaan Daerah Dalam Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2PK), Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD/CERD), dan berbagai program dilakukan oleh pemerintah daerah.

¹ Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;

² Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup menarik, namun dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis multi dimensi, menyebabkan bertambahnya penduduk miskin Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan dengan *pendekatan pemberdayaan masyarakat*, yakni memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat turut serta dalam proses pembangunan dengan mendapat kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan. Pendekatan tersebut diperkuat dengan GBHN 2000-2004 dan Propenas 2001-2004, yaitu bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bahwa *masyarakat memperoleh ruang untuk menentukan pilihan kegiatan* yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Ini artinya dalam perwujudan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan, diperlukan partisipatif masyarakat.

Strategi penanggulangan kemiskinan nasional memuat 4 pilar yaitu; (1) perluasan kesempatan kerja dan usaha, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) peningkatan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat, dan (4) perlindungan sosial, yang pelaksanaannya harus didukung dengan implementasi program.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti: Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT 1995-2000) dan Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D 2000-2003), Pilot Project PKP2D (2003-2005), Program PDM-DKE, Program Pengembangan Kecamatan (PPK 1998/1999-2004), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2PK 1999-2005), Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD/CERD 2001-2005), merupakan suatu model pembangunan partisipatif.

Secara model konseptual, mempunyai basis terapan di tiga aspek sekaligus, yaitu aspek Sektoral (*Sectoral Based*), aspek Regional (*Regional Based*), dan aspek Masyarakat (*Community Based*). Secara model operasional, menawarkan suatu pendekatan yang partisipatif (*Participatory Approach*) melalui suatu optimasi koordinasi (*Optimum Coordination*) yang transparan (*Transparency Process*) dalam rangka mencapai tujuan secara terukur (*Accountability*).

Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang program penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

PENGAJIAN

Pemberdayaan.

Menurut Edi Suharto, (2004) secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

1. Model Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons (1994) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja dan klien dalam setting pertolongan perseorangan.

Karenanya, dalam konteks sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga dimensi pendekatan yakni :

a. Pendekatan Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervension. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Pendekatan Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan Makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2. Dimensi Pemberdayaan

Kieffer (1984) mengemukakan ada tiga dimensi pemberdayaan yakni :

- a. kompetensi kerakyatan
- b. kemampuan sosiopolitik
- c. kompetensi partisipatif

Sedangkan menurut Parsons (1994), pemberdayaan sedikitnya mencakup tiga dimensi :

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Perubahan Pola Perencanaan Pembangunan.

Pada tahun 1980-an, dalam penyusunan APBN digunakan model perencanaan yang ditetapkan dari atas (*top down planning*) yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah yang ada di daerah. Sejak diterbitkan Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1979 yang kemudian diperkuat menjadi Peraturan Mendagri No. 2 tahun 1982 tentang Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian Proyek Pembangunan di Daerah (P5D), diatur proses perencanaan tahunan sebagai suatu proses dari bawah sampai ke pusat sebagai berikut :

- a. Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes)
- b. Diskusi UDKP di tingkat kecamatan

- c. Rakorbang II di tingkat Pemda Tingkat II (Kabupaten/Kota)
- d. Rakorbang I di tingkat Pemda Tingkat I
- e. Rapat Konsultasi Regional antar Propinsi
- f. Rapat Konsultasi Nasional di Pusat

Dalam rangkaian proses tersebut, diusulkan berbagai proyek, sesuai dengan keinginan daerah mulai dari tingkat desa.

Sejak awal Repelita VI, sebagai pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II setelah PJP I selesai, timbul gagasan untuk mempercepat upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Ada kebijakan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat miskin di desa tertinggal berupa bantuan modal dan pendampingan.

Setelah pemberian bantuan berjalan, tahun 1994/1995 dipandang perlu untuk mendukung desa tersebut dengan pembangunan prasarana, maka mulai tahun 1995/1996 diadakan upaya pembangunan prasarana untuk mendukung desa tertinggal dikenal dengan nama Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT).

Pada pelaksanaan P3DT, kebijakan perencanaan diubah secara drastis. Program ini tidak menggunakan lagi pola *top down planning* tapi dibalik menjadi *bottom up* yang prosesnya ditempuh adalah :

- a. Diskusi UDKP-1 : Informasi akan ada proyek dalam kecamatan.
- b. Penetapan hamparan kegiatan ekonomi dan pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS).
- c. Diskusi dalam KDS melalui analisa SWOT untuk mengidentifikasi prasarana yang akan mendukung kegiatan ekonomi.
- d. Diskusi UDKP-2 untuk penilaian usulan. Diterapkan kriteria penilaian untuk prioritas, kemudian ditetapkan Renstra.
- e. Rapat UDKP-3, melalui proses analisa kategorisasi prasarana, analisa sosial ekonomi, teknik dan lingkungan ditetapkan rencana 3 tahun.
- f. Penyusunan DED dan Rencana Teknis melalui investigasi teknis dan kemampuan OMS, pembuatan desain serta RAB.
- g. Diskusi UDKP-4, penetapan bentuk pelaksanaan yaitu : Pola KSO atau pola SP3

Pada hakekatnya pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi ini akan berjalan sesuai roh P3DT yakni pola *bottom up planning* atau lebih populer dikenal pola **pemberdayaan masyarakat**.

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengembangkan potensi masyarakat yang ada melalui kegiatan pembelajaran kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk dengan:

- a. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat, akses yang lebih banyak kepada pelaku lain supaya dapat mengembangkan potensi yang ada dan membuka diri terhadap peluang yang disediakan oleh pelaku-pelaku lain yang terkait dengan kondisi mereka.
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat berupa penciptaan peluang pelatihan dan pendidikan baik teknis maupun non teknis.

- c. Memberikan peluang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga masyarakat untuk dapat menguasai aset yang ada, terutama pada hal pengelolaan agar prasarana yang telah dibangun dapat menjadi aset yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan pengelompokan masyarakat berdasarkan kebutuhan prasarana yaitu dengan membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Badan Pengelola (BP) untuk setiap jenis prasarana.

Badan Pengelola (BP) adalah organisasi warga masyarakat yang merupakan bagian dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang bertugas mengelola seluruh prasarana di desanya, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana serta mengusulkan kebutuhan penanganan prasarana tersebut kepada LKM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP melibatkan peran serta masyarakat dan menumbuhkan semangat swadaya dalam masyarakat agar prasarana yang telah dibangun dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkelanjutan.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Ada 3 (tiga) pendekatan untuk meningkatkan kapasitas warga komunitas (masyarakat) dan sistem kelembagaan agar mempunyai kemampuan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapai, yakni pendekatan partisipatif (*participatory approach*), pendekatan kemanusiaan (*humanity approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Parsipatif (Participatory Approach)

Dalam penanggulangan masalah pengelolaan komoditas dan masalah lainnya oleh suatu komunitas, warga diajak untuk memahami permasalahannya menurut persepsi mereka sendiri, mengetahui sebab akibat timbulnya permasalahan tersebut, mengetahui dan menyadari, serta mengajak mereka untuk memecahkan permasalahan tersebut berdasarkan potensi yang ada dan mengakses potensi sumberdaya luar (dana, teknologi, dan pasar serta informasi lainnya). Untuk menanggulangnya metode yang digunakan untuk melakukan hal tersebut diatas adalah dengan *Participatory Action Research (PAR)*. Berbagai media yang dikenal masyarakat setempat digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Tenaga lapangan (fasilitator) dalam proses perencanaan dan dalam pelaksanaan kegiatan bertindak sebagai katalisator, fasilitator dan networking dengan berbagai pihak yang mempunyai potensi untuk bekerja sama atau bermitra dalam pelaksanaan kegiatan yang masih membutuhkan bantuan pihak luar.

Pendekatan Kemanusiaan (Humanity Approach)

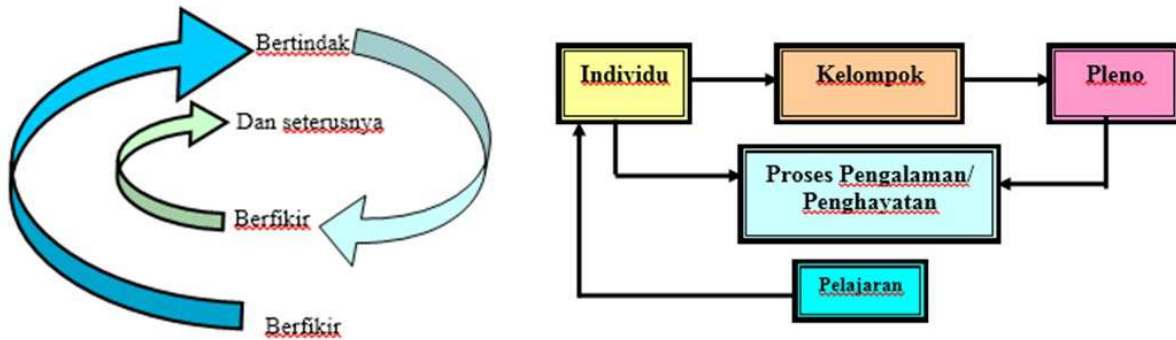
Manusia pada hakekatnya (fitrahnya) adalah pelaku atau subyek, bukan penderita atau obyek, yang bertindak secara sadar untuk mengatasi permasalahan dan realita yang dihadapinya. Karena permasalahan dan realita yang ada bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, dan harus diterima menurut apa adanya sebagai suatu takdir atau nasib yang tak terelakan, semacam mitos. Manusia harus menggeluti permasalahan dan realitas tersebut dengan penuh sikap kritis dan daya cipta. Hal ini berarti perlunya sikap orientatif yang merupakan pengembangan bahasa pikiran, yang mampu memahami keberadaan dirinya dengan lingkungannya untuk melakukan perubahan dan pikiran dan tindakan-tindakan nyata.

Manusia mempunyai naluri, kesadaran, kepribadian dan eksistensi dirinya, disamping memiliki keterbatasan. Dengan fitrah kemanusiaannya seseorang harus mampu mengatasi situasi-situasi batas yang mengekangnya. Jika seseorang menyerah pasrah pada situasi batas itu, apalagi tanpa ikhtiar dan kesadaran sama sekali, maka ia tidak manusiawi lagi.

Dan seseorang hidup didunia dengan orang-orang lain sebagai suatu komunitas, maka kenyataan “ ada bersama “ (*being together*) itu harus dijalani dalam proses “menjadi “ (*becoming*) secara terintegrasi untuk menjadi manusia seutuhnya.

Proses pembebasan manusia dari situasi yang mengekanginya dengan proses penyadaran tentang realita diri dan lingkungannya melalui proses belajar dengan dasar bertindak dan berpikir yang berlangsung secara terus menerus.

Adapun gambaran daur belajar tersebut sebagai berikut :



Gambar 1. Proses pendekatan kemanusiaan

Pendekatan Konseptual / pendekatan jalan tengah.

Terdapat dua pendekatan konseptual yang sering digunakan dalam proses pembangunan, yakni **bottom up** dan **top down** . Pada pendekatan bottom up, segala aspek manajemen sesuai dengan usulan dari bawah, sementara itu top down, segala aspek manajemen ditetapkan dari atas.

Dalam konteks pekerjaan, pendekatan bottom up belum terbiasa dilaksanakan dan akan menyebabkan keberlangsungan kemanfaatan prasarana yang akan dibangun tidak terjamin. Sementara itu pendekatan top down sangatlah sulit dikembangkan peran serta masyarakat, apalagi masyarakat sudah bisa menilai sendiri mutu dari jenis pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara “terpaksa” dengan tidak melibatkan peran serta masyarakat.

Dengan demikian untuk pelaksanaan pekerjaan ini, digunakan pendekatan konsepsi “jalan tengah” yaitu penggunaan bottom up dan top down secara proporsional, dalam artian bahwa :

- (i) Segenap usulan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut, danyang tahu tentang permasalahan dan potensi yang ada adalah masyarakat setempat.
- (ii) Dalam proses penyusunan usulan proyek telah dikenal lama dengan menggunakan bottom up planning yaitu dengan adanya proses rakorbang dari tingkat paling bawah sampai dengan atas.
- (iii) Dalam pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja baik terampil, setengah terampil maupun tidak terampil cukup tersedia terutama pada saat masyarakat tidak sedang dalam pekerjaan sesuai dengan musimnya.

Ketiga hal tersebut diatas pendekatan bottom up akan banyak manfaatnya.

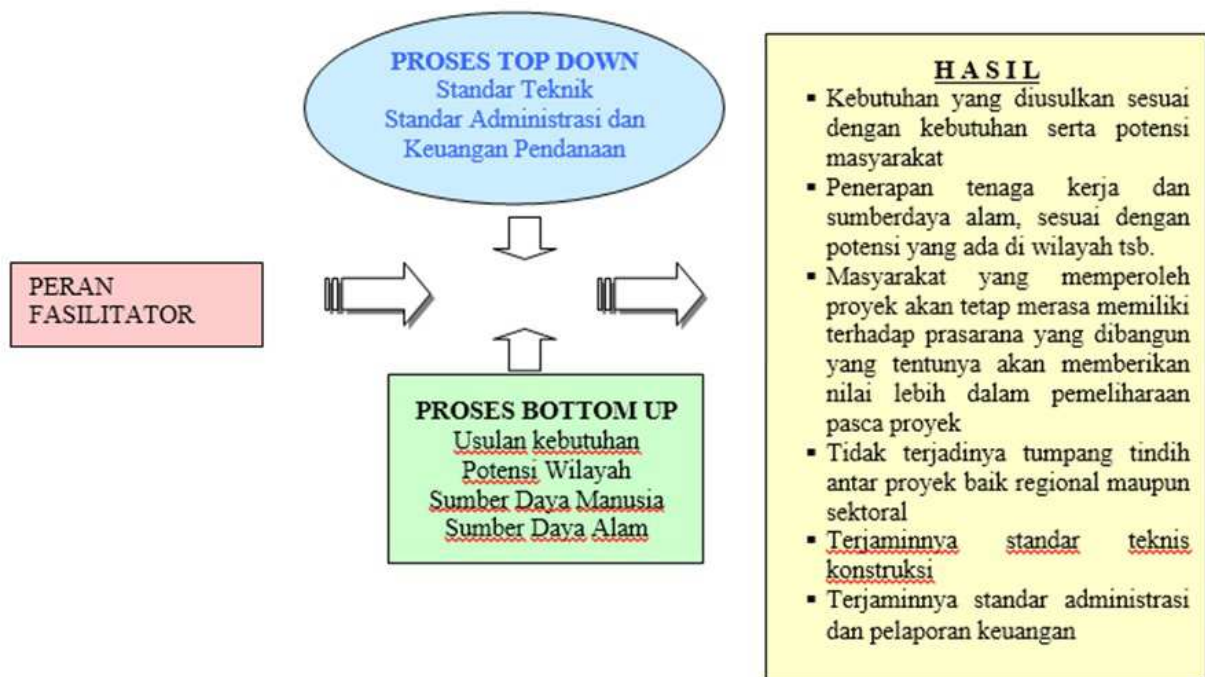
Pada aspek yang lain perlu adanya pertimbangan diantaranya :

- (i) Meskipun pembangunan prasarana adalah prasarana sederhana, tetap diperlukan adanya standard teknis dan pengawas teknis yang mumpuni.
- (ii) Bahwa proyek ini tidak berdiri sendiri dalam arti bahwa proyek-proyek lain sehingga diperlukan adanya koordinasi dalam pemilihan prasarana yang dibangun

(iii)Dibutuhkan adanya pertanggung-jawaban baik administratif maupun keuangan yang memadai standar nasional.

Dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka penggunaan metode tersebut akan memberikan manfaat:

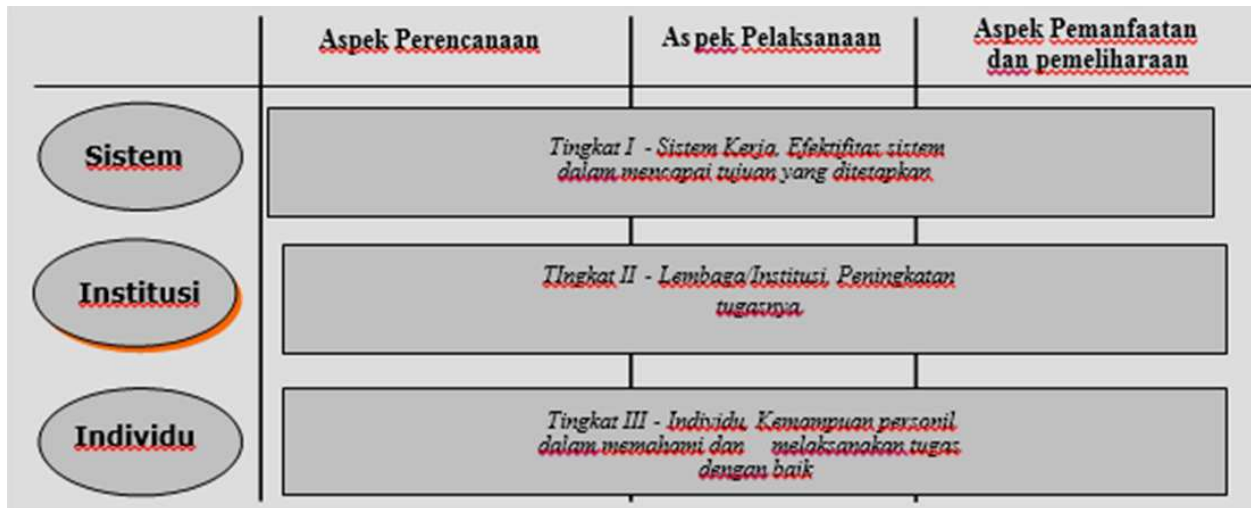
- (i) Kebutuhan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat.
- (ii) Penyerapan tenaga kerja dan sumber daya alam, sesuai dengan potensi yang ada dilokasi.
- (iii)Masyarakat yang memperoleh proyek akan tetap merasa memiliki terhadap prasarana yang dibangun yang tentunya akan memberikan nilai lebih dalam pemeliharaan pasca proyek.
- (iv)Tidak terjadinya tumpang tindih antar proyek baik regional maupun sektoral
- (v) Terjaminnya standar teknis konstruksi
- (vi)Terjaminnya standard administrasi dan pelaporan keuangan.



Gambar 2. Proses pendekatan jalan tengah (konseptual)

Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Tiga tingkatan perhatian terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kemampuan Pemerintah Daerah (*Capacity Building*). Ketiga tingkatan perhatian tersebut adalah tingkat Sistem, tingkat Institusi (Kelembagaan) dan tingkat Individu.

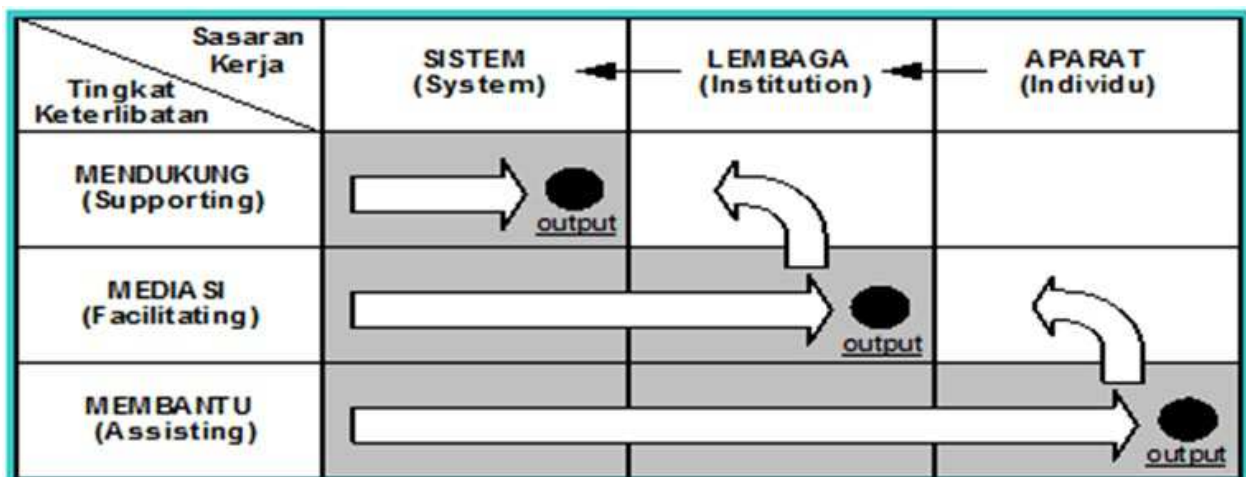


Gambar 3. Capacity building dalam 3 tingkatan

Seperti terlihat pada gambar diatas, perspektif substansi *Capacity Building* terkait pada aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, pemanfaatan dan peasppek Pengendalian.

- (i) Tingkat tertinggi adalah tingkatan SISTEM, kemudian berturut-turut tingkatan LEMBAGA, dan tingkatan INDIVIDU. Ketiga tingkatan yang disebutkan memiliki durasi waktu penanganan yang berbeda, serta dampak pada satu tingkat memberikan pengaruh kepada tingkat lainnya.
- (ii) Tingkatan sistem memiliki kebutuhan penanganan yang lebih luas dan kompleks, serta perubahan pada kinerja SISTEM dipengaruhi oleh perubahan pada tingkatan INSTITUSI/LEMBAGA, demikian juga perubahan pada tingkat INSTITUSI/LEMBAGA dipengaruhi oleh tingkatan INDIVIDU.
- (iii) Dikarenakan durasi waktu penanganan serta kompleksitasnya yang berbeda, maka diperlukan metode penanganan yang disesuaikan pada setiap tingkatan.

Dalam implementasinya perlu menerapkan tiga jenis metode penanganan pada setiap tingkatannya, yaitu metode Pendukungan (*supporting*), metode Mediasi (*facilitating*), serta metode Pembantuan (*Assissting*).



Gambar 4. Konsep keterlibatan dalam 3 tingkatan

Membangun kapasitas harus dilihat dari kemampuan untuk mencapai suatu kinerja tertentu sebagai suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pencapaian ini akan memberikan keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Di samping itu, upaya membangun kapasitas harus ditempatkan

pada suatu kerangka kerja yang dinamis, serta harus dikaji secara terus menerus sepanjang upaya tersebut dilakukan. Karakter kegiatan *Capacity Building* adalah dinamis, sehingga diperlukan suatu strategi manajemen pelaksanaan yang cukup fleksibel dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi, baik yang menyangkut variasi *issues* pada beberapa kabupaten yang dicakup, maupun perkembangan situasi selama pelaksanaan program di suatu Kabupaten tertentu. Keluaran akhir dari setiap tingkatan tersebut seperti gambar berikut.



Gambar 5. Strategi manajemen 3 tingkatan

Tingkat Sistem,

Memberikan suatu kerangka kerja kebijakan dan pengaturan bagi perangkat pengambil keputusan Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dalam upaya melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pembangunan wilayah.

Tingkat Lembaga/Institusi,

Memberikan suatu kerangka kerja pengelolaan (manajemen) bagi perangkat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembangunan wilayah dan sektor daerah

Tingkat Individu,

Memberikan suatu kerangka pengembangan etos dan kemampuan kerja serta kompetensi personil di dalam melaksanakan tugas-tugasnya

Ketiga pola penanganan tersebut memberikan fleksibilitas atas tuntutan kebutuhan di masing-masing tingkatan, sehingga sesuai dengan karakter kegiatan *Capacity Building* yang dinamis.

Mendukung (Supporting),

Pola ini memberikan masukan berupa dukungan atas kegiatan-kegiatan yang bersifat “formulation policy and decision making process”. Tim Pendamping hanya memberikan masukan-masukan materi serta dukungan yang bersifat strategis agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tidak terlibat di dalam prosesnya sendiri, karena hal tersebut menyangkut keputusan-keputusan normatif dan kadangkala bersifat politis.

Mediasi (Facilitating),

Agak berbeda dengan pola Pendukung, maka pola kerja Mediasi ini menitikberatkan kepada keterlibatan kerja dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas lembaga/instansi perencanaan. Karena itu, pola kerja mediasi (fasilitasi) mengarahkan kegiatannya kepada hal-

hal yang bersifat “strenghtening activities work process prior to its function and role”. Dalam hal ini, Tim Pendamping akan turut terlibat pada beberapa kegiatan kerja untuk meningkatkan kinerja fungsi dan tugas instansi perencanaan tersebut.

Bantuan (Assisting),

Pola kerja pembantuan ini merupakan pola yang lebih aktif dan mempunyai sasaran langsung kepada individu atau personil yang terkait dengan tugas-tugas perencanaan. Dalam hal ini, Tim Pendamping memberikan bantuan yang berupa kerja bersama langsung kepada individu-individu terkait sehubungan dengan penyelesaian tugas-tugasnya. Karena itu, pola kerja terakhir ini mengarahkan kegiatannya lebih kepada “*transferring attitudes, skills, and knowledges to each individu in order to improve their job’s performance*”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

3. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan suatu model pembangunan partisipatif.
4. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dilakukan dengan metode pendekatan partisipatif (*participatory approach*), pendekatan kemanusiaan (*humanity approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
5. Tiga tingkatan perhatian terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kemampuan Pemerintah Daerah (*Capacity Building*) adalah tingkat sistem, tingkat institusi (kelembagaan) dan tingkat individu

REKOMENDASI

1. Sebelum dilakukannya suatu pelaksanaan pekerjaan dengan melibatkan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui seluk beluk rencana kegiatan dan bentuk keterlibatan mereka.
2. Agar pemberdayaan dapat berjalan optimal, perlu diadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh agama di masing-masing lokasi.
3. Walaupun masyarakat telah dipercayakan mengelola kegiatan, namun masih perlu adanya bimbingan dan evaluasi dari instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BPS/Badan Pusat Statistik, 2002. *Penduduk Miskin Indonesia*. BPS Jakarta

Departemen Pekerjaan Umum, 2008 *Petunjuk Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat* Jakarta.

Edi Suharto, Ph.D, 2004, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Centre for Policy Studies Bandung.

Kieffer C.H., 1984 *Citizens Empowerment A Developmental Perspective Prevention in Human Service Vol. 3* . USA

Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, santos H. Hernandez, 1994 *The Integration of Social Work Practice* Wadsworth, California.